

Pembuatan Tapal Batas di Pekon Malaya Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung

Muhammad Abdul Mubdi Bindar ^{1*}, Jatmiko Kurniawan ², Oki Okta Fandi ³, Roida Manullang ⁴,
Wilibrordus Bima Digdya Fergusta ⁵, Feerzet Achmad ⁶

¹ Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera, Jl. Terusan Ryacudu, Lampung Selatan, 35365, Indonesia

² Prodi Perkeretaapian, Institut Teknologi Sumatera, Jl. Terusan Ryacudu, Lampung Selatan, 35365, Indonesia

³ Prodi Arsitektur, Institut Teknologi Sumatera, Jl. Terusan Ryacudu, Lampung Selatan, 35365, Indonesia

⁴ Prodi Rekayasa Kehutanan, Institut Teknologi Sumatera, Jl. Terusan Ryacudu, Lampung Selatan, 35365, Indonesia

⁵ Prodi Teknik Sipil, Institut Teknologi Sumatera, Jl. Terusan Ryacudu, Lampung Selatan, 35365, Indonesia

⁶ Prodi Teknik Kimia, Institut Teknologi Sumatera, Jl. Terusan Ryacudu, Lampung Selatan, 35365, Indonesia

Submitted: February 20th 2024; Revised: March 17th 2024; Accepted: March 28th 2024

Keywords:

Boundary Marker,
Rural Areas,
Village Boundaries

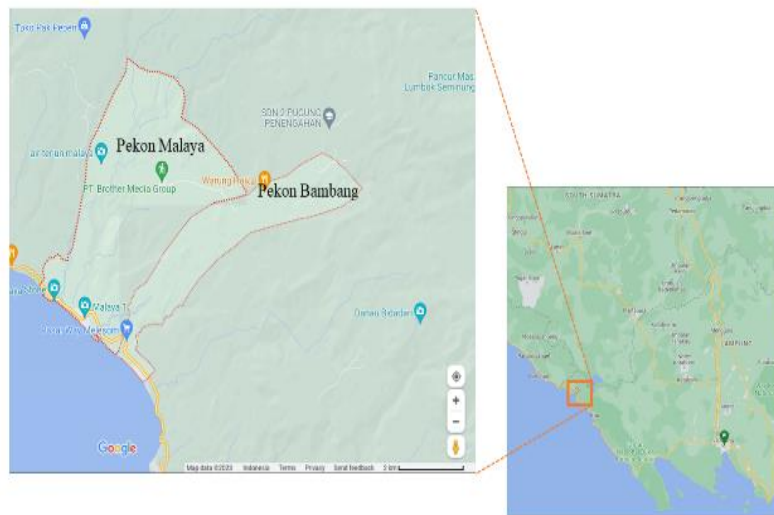
Abstract

The certainty of village boundaries is important in the management of rural areas. The lack of clarity in the boundaries between Pekon Malaya and Pekon Bambang in Lemong District, Pesisir Barat Regency, Lampung, has led to the need to establish clear boundaries between the two villages. This study aims to construct physical boundary markers between the two pekons to avoid territorial conflicts. The methods used include inter-village consultation, design, and physical construction of the boundary markers. The main result of this study is the creation of clear physical boundary markers between Pekon Malaya and Pekon Bambang, which can be used as a reference in resolving village boundary issues in the future. The conclusion of this study is that the construction of physical boundary markers can be an effective solution to address the problem of unclear village boundaries.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang memungkinkan negara menggunakan titik koordinat untuk menentukan batas wilayahnya. Karena titik-titik koordinat yang menunjukkan batas-batas kedaulatan negara relatif stabil tanpa dipengaruhi oleh berbagai kondisi, maka terdapat kepastian hukum yang menjamin batas-batas kedaulatan negara (Ahmad & Zuharnen, 2017). Pada pemanfaatannya, batas-batas desa dapat ditetapkan dengan merundingkan titik-titik koordinat di atas peta kerja yang didapatkan dari olahan citra resolusi tinggi (Bashit et al., 2019). Namun, di sisi lain, pada praktiknya, batas desa atau tapal batas yang dibuat secara fisik masih perlu disediakan mengingat batas-batas wilayah ini bagi desa mempunyai peran penting sebagai batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa (Muliyanto, 2016).

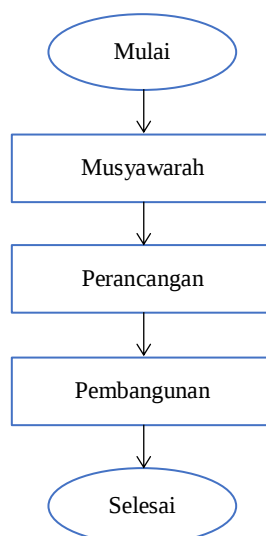
Pekon (Desa) Malaya, Kecamatan Lemong, terletak di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pekon ini memiliki persoalan berupa ketidakjelasan batas dengan Pekon Bambang. Dengan demikian, pada kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh kelompok 5 Kuliah Kerja Nyata dalam Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dilakukan kegiatan pembangunan batas pekon atau tapal batas antara Pekon Malaya dengan Pekon Bambang (Gambar 1). Artikel ini memaparkan proses penentuan hingga pembangunan tapal batas yang telah disepakati kedua pemerintahan pekon selama kegiatan KKN berlangsung.



Gambar 1. Lokasi Pekon Malaya dan Pekon Bambang

2. METODE

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 26 Juni – 06 Juli 2023 pada pukul 08.00-16.00 WIB. Kegiatan ini dilakukan di wilayah Way Penyantun tepatnya perbatasan antara pekon Bambang dan Pekon Malaya Kec. Lemong, Kab. Pesisir Barat, Lampung. Terdapat tiga tahapan besar yang dilakukan dalam pembuatan tapal batas ini: tahap musyawarah, tahap perancangan, dan tahap pembangunan (Gambar 2).



Gambar 2. Metodologi pelaksanaan program pembangunan tapal batas

Pada tahap musyawarah, didiskusikan persoalan tentang ketidakjelasan batas wilayah antara Pekon Malaya dengan Pekon Bambang. Musyawarah ini melibatkan kedua perangkat pekon. Pada tahap selanjutnya, yakni perancangan, tim KKN dengan pendampingan dari perangkat Pekon Malaya melakukan survei lapangan ke lokasi untuk mengetahui batasan-batasan dalam rancangan tapal batas yang akan dibuat. Tahap pembangunan melibatkan seluruh anggota tim KKN yang turut dibantu oleh Karang Taruna dan perangkat Pekon Malaya. Produk akhir dari kegiatan ini adalah tapal batas yang dapat dikenali dengan pemberian warna yang sangat jelas dan mudah dikenali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori implemementasi Permendagri oleh Riadi (2015), Penegasan batas desa merupakan salah satu proses sangat diperlukan dalam tahapan penyelesaian tapal batas desa, tahap ini cukup rumit (Riadi, 2015). Hal ini karena perlunya menyatukan pekon yang berebut perbatasan, dan tentu saja memiliki pro dan kontra dalam menjaga wilayah masing-masing pekon. Sesuai dengan metode yang digunakan, hasil dari masing-masing tahapan yang dilalui dibahas sebagai berikut:

Musyawarah

Musyawarah dilakukan dengan melibatkan kedua perangkat pekon yang juga dihadiri oleh kedua peratin (kepala pekon). Musyawarah dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 di Balai desa Pekon Malaya (Gambar 3a). Hasil dari musyawarah ini adalah disepakatinya pembuatan tapal batas dengan material beton yang diputuskan akan dibangun di samping jembatan Way Penyantun.

Perancangan

Kegiatan perancangan didahului dengan kegiatan survei pelacakan lokasi batas desa yang disepakati. Pelacakan lokasi ini dibagi menjadi dua kegiatan di antaranya menentukan batas sementara dan aktivitas selanjutnya menelusuri batas desa langsung ke lapangan. Setelah menggambar batas desa pada peta, tim menelusuri batas tersebut langsung ke lapangan untuk menyakinkan batas desa tidak mengandung kesalahan. Untuk menandai batas desa secara sementara tiang kayu dipancangkan di titik batas yang sudah disepakati antar pekon. Setelah menemukan titik batas, tim melakukan perancangan fisik tapal batas. Rancangan tapal batas kemudian dibuat menggunakan perangkat lunak desain yakni AutoCAD dan SketchUp (Gambar 3b).

Pembangunan

Tahap pembangunan melibatkan seluruh anggota tim KKN yang turut dibantu oleh Karang Taruna dan perangkat Pekon Malaya. Pembangunan dimulai dengan mendirikan fondasi yang dicapai dengan mencangkul tanah terlebih dahulu, mencampurkan pasir, semen dan air sebagai perekat dengan perbandingan 2:10 ember, dan menata batu kali untuk direkatkan dengan adukan semen tadi (Gambar 3c) (Choirina, 2017). Setelah fondasi berhasil dibuat, struktur tapal batas dibangun. Adukan semen, pasir, dan air dibuat kembali, papan dan tali dibuat sebagai pengarah kerangka bangunan dan dipastikan tegak lurus menggunakan unting-unting (Serli, 2021). Batu bata kemudian dipasang untuk membuat struktur tegak tapal dengan tentunya direkatkan

menggunakan semen. Struktur yang sudah jadi dikeringkan selama 24 jam untuk kemudian ditempel lapisan plester (Gambar 3d).

Untuk memplester, semen dan pasir dengan perbandingan 3:15 ember diaduk menggunakan air dan kemudian diaplikasikan ke permukaan batu bata yang telah direkatkan yang terlebih dahulu sudah diukur ketebalannya menggunakan paku (Tanubrata, 2015). Lapisan plester didiamkan kembali selama 24 jam sebelum diberi tulisan penanda (*signage*) *Selamat Datang di Pekon Malaya* dan *Selamat Jalan dari Pekon Malaya* dari arah luar dan dalam pekon (Gambar 3e). Produk akhir dari kegiatan ini adalah tapal batas yang dapat dikenali dengan pemberian warna yang sangat jelas dan mudah dikenali oleh semua orang (Gambar 3f dan 3g). Kegiatan pembangunan ini selain oleh tim mahasiswa, juga diikuti oleh sejumlah perangkat pekon dan anggota Karang Taruna kedua pekon yang berjumlah 10 orang. Antusiasme warga yang datang terlihat dari kolaborasi yang terjadi antara mahasiswa dengan warga yang turut aktif tersebut.



Gambar 3. Dokumentasi kegiatan-kegiatan dalam pembangunan tapal batas di Pekon Malaya

Pengesahan Batas Desa

Pengesahan batas pekon antara Pekon Bambang dan Pekon Malaya sebelumnya sudah disepakati dan sudah ditandatangani oleh para Peratin (Kepala Desa) masing-masing pekon, dan ditetapkan batas desa antara Pekon Bambang dengan Pekon Malaya ada di jembatan Way Penyantun. Kemudian diskusi yang sudah dilakukan oleh perangkat pekon dan karang taruna Pekon Malaya didapatkan kesepakatan lokasi pembangunan tapal batas pekon berada di Way Penyantun (Harahap, 2019; Utomo, 2015).

Faktor Penghambat

Sempitnya lahan untuk membangun tapal batas, banyaknya semak-semak liar yang tumbuh di area lahan, kemudian saat penggalian pondasi terdapat banyak bebatuan sehingga menghambat proses penggalian lalu untuk alat-alat pertukangan juga kurang memadai, untuk pengambilan material pasir juga cukup jauh lokasinya harus kepantai terlebih dahulu dan yang terakhir cuaca yang sering hujan.

Faktor Pendukung

Partisipasi perangkat desa dan karang taruna yang kompak turut serta membantu dalam proses pembangunan tapal batas seperti membantu mengambil batu kali, batu bata, pembersihan lahan, peminjaman peralatan yang digunakan pada pekerjaan ini. Material yang digunakan seperti batu kali dan pasir tidak perlu membelinya karena sudah tersedia di alam. Kemudian faktor yang paling utama adalah adanya tapal batas ini bisa diterima dengan baik dari masyarakat pekon Malaya maupun masyarakat pekon Bambang.

Hasil

Hasil atau manfaat dibangunnya tapal batas ini adalah adanya kejelasan batas-batas wilayah antara pekon satu dengan pekon lainnya. Dan dapat menggambarkan besarnya wilayah tersebut. Kemudian konflik perebutan wilayah diharapkan tidak terjadi. Gambar 3g menampilkan hasil tapal batas Pekon Bambang dan Pekon Malaya yang dikerjakan oleh mahasiswa KKN-PPM ITERA. Peratin, aparat desa dan warga sangat senang dan merasa terbantu dengan adanya tapal batas pekon ini. Warga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa ITERA.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pembuatan tapal batas di Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, telah berhasil mencapai tujuannya dalam menetapkan batas yang jelas antara Pekon Malaya dan Pekon Bambang. Metode yang digunakan, yang meliputi musyawarah antarpekon, perancangan, dan pembangunan fisik tapal batas, terbukti sesuai dan efektif dalam mengatasi masalah ketidakjelasan batas desa. Tingkat pencapaian kegiatan ini dapat dilihat dari terciptanya penanda batas fisik yang jelas antara kedua pekon, yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian masalah batas desa di masa mendatang. Pembangunan tapal batas fisik ini juga telah mendapat persetujuan dan dukungan dari peratin (kepala pekon) kedua pekon, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan karang taruna.

Kegiatan selanjutnya disarankan untuk melakukan pemeliharaan dan monitoring terhadap tapal batas yang telah dibangun, guna memastikan keberlangsungan dan kejelasan batas desa. Selain itu, pengembangan sistem informasi geografis GIS (*Geographic Information System*) dapat diintegrasikan untuk memperkuat dokumentasi dan pemetaan batas desa, sehingga dapat memudahkan dalam pengelolaan dan penyelesaian masalah terkait batas desa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. G., & Zuharnen, Z. (2017). Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh dan Metode Kartometris untuk Analisis Perubahan Batas Desa Studi Kasus : Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(3).
- Bashit, N., Prasetyo, Y., Firdaus, H. S., Amarrohman, F. J., & Batas, A. (2019). Penetapan Batas Desa Secara Kartometrik Menggunakan Citra QuickBird. *Jurnal Pasopati*, 1(1). <https://doi.org/10.14710/PASOPATI.2019.4991>
- Choirina, H. (2017). Pengadaan Media Pembelajaran Jobsheet Pemasangan Pondasi Batu Kali/Batu Gunung dan Batu Bata di Kelas XI Jurusan Konstruksi Batu Beton SMKN 7 Surabaya. *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan*, 2(2).
- Harahap, S. B. (2019). Impelemntasi Pasal 8 Ayat (3) Huruf F Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Batas Desa Di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 2(1), 660–663.
- Muliyanto, E. (2016). Kajian Teknis Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Studi Kasus: Kelurahan Tabalong, Kabupaten Tabalong. *Skripsi. Institut Teknologi Nasional Malang. Malang*.
- Riadi, B. (2015). Implementasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Secara Kartometris. *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(1), 92–100.
- Serli, R. D. (2021). *Analisis Kinerja Struktur Bangunan Bertingkat Rendah Dengan Floating Column Menggunakan Metode Pushover Analysis*. Universitas Mataram.
- Tanubrata, M. (2015). Bahan-bahan konstruksi dalam konteks teknik sipil. *Jurnal Teknik Sipil*, 11(2), 132–154.
- Utomo, Y. (2015). *Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah antara Desa Dinas Tulikup dengan Desa Dinas Sidan di Kabupaten Gianyar*.